

BAB II

KAJIAN PUSTAKA YANG RELEVAN BUDAYA POLITIK MELAYU DALAM VISI MISI PEMBANGUNANKOTA PALEMBANG EMAS DARUSSALAM

A. Budaya Politik

Pada hakikatnya setiap orang berbudaya dan memiliki kebudayaannya sendiri. Di Indonesia sendiri seperti yang kita ketahui memiliki beragam kebudayaan di setiap daerahnya. Setiap orang yang berbudaya pasti menunjukkan siapa jati dirinya bahwa darimana ia berasal. Jelas bahwa budaya menunjukkan siapa seseorang sebenarnya di hadapan orang lain, dan setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing (Sutrisno dan Hendar, 2005).

Perumusan budaya dari sudut psikologi menyatakan bahwa budaya merupakan bagian dari perilaku manusia yang di pelajari. Dalam hal ini, maka pengertian di pelajari sangat penting. Kiranya semua pihak mengakui, bahwa apapun yang menjadi bagian yang membentuk kebudayaan, bagian tersebut beralih dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kalau tidak, maka perlu di asumsikan bahwa manusia tidak hanya harus mempunyai dorongan untuk membentuk kebudayaan, akan tetapi perilakunya mengikuti garis-garis tertentu (Soekanto, 1993).

Budaya politik merupakan pola perilaku individu dan orientasinya dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang di hayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Menurut Rusadi Kantaprawira 2006, budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya (Rusadi Kantaprawira 2006).

Kegiatan politik warga negara, tidak hanya ditentukan oleh tujuan-tujuan yang didambakannya, akan tetapi juga oleh harapan-harapan politik yang di milikinya dan oleh pandangannya mengenai situasi politik. Bentuk dari budaya politik dalam suatu masyarakat di pengaruhi antara lain oleh sejarah perkembangan dari sistem, oleh agama yang terdapat dalam masyarakat itu, kesukuan, status sosial, konsep mengenai kekuasaan dan kepemimpinan. Dengan kata lain, budaya politik adalah suatu bangsa yang dapat di definisikan sebagai pola distribusi orientasi-orientasi yang dimiliki oleh anggota masyarakat terhadap objek-objek politik atau bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik di antara masyarakat itu. Lebih jauh di nyatakan, bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasi diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan

orientasi yang mereka miliki. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik (Rusadi Kantaprawira 2006).

Politik di maknai sebagai aktivitas masyarakat dalam suatu bangsa dengan tujuan membuat, mempertahankan, serta memperbaiki peraturan sebagai alat dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. dengan tidak terlepas atas peristiwa konflik dan kerja sama (Heywood, 2019). Tujuan di atas dapat di peroleh melalui sebuah instrumen kekuasaan yang berfungsi dalam menetapkan alokasi sumber daya yang dimiliki. Kekuasaan yang di maksud merupakan sebuah kemampuan individu dan kelompok dalam mempengaruhi perilaku individu bahkan kelompok tentu saja sesuai dengan si pembuat perintah atau pemilik kekuasaan tersebut (Budiardjo, 2017). Sementara itu, budaya politik berkaitan dengan seluruh pengetahuan, emosional, bahkan penilaian etika moril langsung yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (Suryo, 2015). Budaya politik juga berkaitan dengan orientasi politik dan sikap warga negara dalam sistem politik, serta sebuah sikap dari warga negara terhadap sistem tersebut, dengan kata lain budaya politik yang berlaku di sejumlah negara memiliki konsekuensi yang di signifikan untuk dukungan public (Harring et al, 2019). Budaya politik juga berkaitan dengan proses demokrasi, di mana corak politik akan menentukan bagaimana masyarakat di dalamnya berperan dalam kehidupan politik termasuk di dalam proses pemilihan umum (Voinea, 2020). Budaya politik juga memiliki peran penting dalam penentuan kebijakan pemerintah (Kagan et, 2018).

Pengetahuan dan pemahaman akan politik, berikut proses-proses yang ada di dalamnya tidak terlepas dari lingkungan di mana masyarakatnya tinggal dan melakukan sosialisasi secara rutin. Dalam konteks Indonesia, budayapolitik merupakan realitas yang dianggap paling kuat dan fundamental dalam sistem politik (Gatara & Said, 2007). Terlebih bahwa budaya masyarakat Indonesia khususnya budaya antar etnis yang demikian heterogen dan kompleks dengan fragmensinya menghasilkan heterogenitas etnis dan budayadan menjadikannya sebagai negara di dunia yang paling plural dengan bahasapaling beragam (Lukas, 2002). Secara umum terdapat 2 (dua) kategori untuk dapat menjelaskan eksistensi budaya politik dalam sebuah entitas negara atau unit pemerintahan yang lebih kecil yaitu konsep budaya politik yang di pahami secara struktural yang melihat budaya politik sebagai fenomena dan konsep budaya politik yang di pandang dalam makna fungsional dan instumental yang menjadi determinan dalam perilaku memilih (Marijan,1999). Dengan demikian relasi budaya politik dengan perilaku politik memilih menjadi lebih jelas dalam konteks ini.

Pureklolon (2021). Budaya politik jika dilaksanakan dalam ketentuan-ketentuan yang benar akan berdampak terhadap berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan dan lain-lain :

1. Dampak budaya politik terhadap perekonomian Budaya memiliki peranan yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara karena terkait dengan pembentukan trust di dalam kelompok. Indonesia mempunyai tingkat heterogenitas yang tinggi sehingga di

dalam kehidupan perekonomian akan membutuhkan biaya transaksi yang di tanggung oleh masyarakat karena adanya perbedaan budaya tersebut.

2. Budaya Politik Terhadap Pendidikan Budaya politik terhadap pendidikan dapat di atasi dengan pendidikan yang formal maupun nonformal, maka pemikiran seseorang dapat menjadi lebih terbuka dan lebih toleran terhadap perbedaan.

Pureklolon (2021). untuk mengetahui karakter budaya politik suatu bangsa, dapat di ukur melalui beberapa hal, yakni:

1. Tingkat pengetahuan umum masyarakat mengenai sistem politik negaranya. Contohnya pengetahuan tentang sejarah, letak geografis, dan konstitusi negara.
2. Pemahaman masyarakat mengenai struktur dan peran pemerintah dalam membuat kebijakan.
3. Pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang mencakup opini atau pendapat dari masyarakat dan media massa kepada pemerintah.
4. Seberapa besar tingkat partisipasi politik warga masyarakat serta sejauh mana pemahamannya tentang hak dan kewajiban sebagai warga Negara.

Berdasarkan orientasi-orientasi warga negara terhadap kehidupan politiknya atau budaya politiknya, Almond dan Verba membaginya dalam tiga tipe budaya politik, yakni budaya politik parokial, budaya politik kaula atau subjek dan budaya politik partisipan. Yang penting dari klasifikasi tersebut adalah kepada objek politik apa, aktor politik individual yang berorientasi, bagaimana mereka mengorientasikan diri, dan apakah objek-objek politik tersebut terlibat secara mendalam dalam pembuatan kebijaksanaan yang bersifat ke atas atau dalam arus pelaksanaan kebijaksanaan yang bersifat ke bawah. (Almond dan Verba,) Hasilnya adalah klasifikasi tiga tipe ideal budaya politik, yaitu sebagai berikut

1. Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial adalah spesialisasi peranan-peranan politik atau tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah). Budaya politik parokial juga ditandai oleh tidak berkembangnya harapan-harapan akan perubahan yang akan datang dari sistem politik. Budaya politik parokial yang kurang lebih bersifat murni merupakan fenomena umum yang biasa di temukan di dalam masyarakat-masyarakat yang belum berkembang, di mana spesialisasi politik sangat minim (Almond dan Verba 1984).

Budaya politik parokial biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana, dengan ciri khas spesialisasi masih sangat kecil dan sederhana, sehingga pelaku-pelaku politik belumlah memiliki pengkhususan tugas. Tetapi peranan yang satu di lakukan bersamaan dengan peranan yang lain seperti aktivitas dan peranan pelaku politik di lakukan bersamaan dengan peranannya baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun keagamaan / spiritual.

Selain itu, dalam budaya politik parokial juga menyatakan apa harapan-harapan akan perubahan yang komparatif yang diinisiasikan oleh sistem politik. Masyarakat dengan budaya politik parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik (Almond dan Verba, 1984).

Budaya politik parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Budaya politik suatu masyarakat dapat di katakan Parokial apabila frekuensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut. Tipe budaya politik ini umumnya terdapat pada masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman di Indonesia. dalam masyarakat ini tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Kepala suku, kepala kampung, kyai, atau dukun, yang biasanya merangkum semua peran yang ada, baik peran yang bersifat politis, ekonomis atau religious (Sumartono, 2018).

Dalam penjelasan yang luas bahwa budaya politik parokial merupakan tipe budaya politik yang paling rendah. Dalam budaya politik ini masyarakat tidak merasakan bahwa mereka adalah warga negara dari suatu negara, mereka lebih mengidentifikasikan dirinya pada perasaan lokalitas. Tidak terdapat kebanggaan terhadap sistem politik tersebut. Mereka tidak memiliki perhatian terhadap apa yang terjadi dalam sistem politik, pengetahuannya sedikit tentang sistem politik, dan jarang membicarakan masalah-masalah politik. Budaya politik ini juga mengindikasikan bahwa masyarakatnya tidak memiliki minat maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Perasaan kompetensi politik dan keberdayaan politik otomatis tidak muncul, ketika berhadapan dengan institusi-institusi politik (Mustanir dan Jaya, 2016).

Budaya politik parokial, masyarakat masih memiliki ciri tradisional yaitu peranan politik seperti partisipasi politik yang rendah, yang dipengaruhi oleh faktor kognitif dari masyarakat meliputi tingkat pendidikan yang rendah. Budaya politik ini ditandai dengan tidak berkembangnya harapan akan perubahan dalam sistem politik tersebut (Ulzikri, Cahyadi dan Indrajat, 2021).

2. Budaya Politik Subjek / Kaula

Masyarakat yang berbudaya politik subjek/kaula, mereka memang memiliki frekuensi orientasi-orientasi yang tinggi terhadap sistem politiknya, namun perhatian dan intensitas orientasi mereka terhadap aspek masukan (*input*) dan partisipasinya dalam aspek keluaran (*output*) masih sangat rendah. Subjek individual menyadari akan otoritas pemerintah yang memiliki spesialisasi, ia bahkan secara efektif mengorientasikan diri kepadanya, ia memiliki kebanggaan terhadapnya atau sebaliknya tidak menyukainya, dan ia menilainya sebagai otoritas yang absah. Namun demikian, posisinya sebagai subjek (kaula) mereka pandang sebagai posisi yang pasif. Di yakini bahwa posisinya tidak akan menentukan apa-apa terhadap perubahan politik (Almond dan Verba, 1984). Mereka beranggapan bahwa dirinya adalah subjek yang tidak berdaya untuk mempengaruhi atau mengubah sistem. Dengan demikian secara umum mereka menerima segala keputusan dan

kebijaksanaan yang diambil oleh pejabat yang berwenang dalam masyarakat. Bahkan rakyat memiliki keyakinan bahwa apapun keputusan/kebijakan pejabat adalah mutlak, tidak dapat diubah-ubah, di koreksi apalagi di tentang. Budaya politik ini di temukan dalam masyarakat yang orang-orangnya secara pasif patuh terhadap pejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undang, tetapi tidak melibatkan diri dalam politik atau memberikan suara dalam pemilihan. Dalam budaya ini tidak di kembangkannya kapabilitas responsif, sehingga masyarakat enggan untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan politik. Budaya politik subjek muncul jika orientasi efektif saja yang kuat (Budi Winarno, 2008). Demokrasi sulit untuk berkembang dalam masyarakat dengan budaya politik subjek/kaula, karena masing-masing warga negaranya tidak aktif. Selain itu, mereka juga memiliki kompetensi politik yang rendah dan keberdayaan politik yang rendah sehingga sangat sukar untuk mengharapkan partisipasi politik yang tinggi.

Budaya politik kaula (subjek), yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan subyek jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output atau terdapat pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Namun frekuensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah dan secara efektif mereka di arahkan pada otoritas tersebut. Sikap masyarakat terhadap sistem politik yang ada di tunjukkan melalui rasa bangga atau malah rasa tidak suka. Intinya, dalam kebudayaan politik subyek, sudah ada pengetahuan yang memadai tentang sistem politik secara umum serta proses penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (Sumartono, 2018).

Budaya politik kaula lebih rendah satu derajat dari budaya politik partisipan. Masyarakat dalam tipe budaya ini tetap memiliki pemahaman yang sama sebagai warga negara dan memiliki perhatian terhadap sistem politik, tetapi keterlibatan mereka dalam cara yang lebih pasif. Mereka tetap mengikuti berita-berita politik, tetapi tidak bangga terhadap sistem politik negaranya dan perasaan komitmen emosionalnya kecil terhadap Negara. Mereka akan merasa tidak nyaman jika membicarakan masalah masalah politik (Mustanir dan Jaya (2016).

Budaya politik kaula ditandai dengan kesadaran masyarakat dalam memberikan input politik nihil dan pasif bahkan cenderung lemah. Sebenarnya telah memiliki kesadaran adanya otoritas dari pemerintah. Masyarakat juga sudah aktif memiliki orientasi suka dan tidak suka terhadap pemerintah. Namun, masyarakat masih berkeyakinan bahwa andilnya dalam aktivitas politik tidak memiliki pengaruh untuk perubahan dalam sistem politik (Ulzikri, Cahyadi dan Indrajat, 2021).

3. Budaya Politik Partisipan

Budaya politik partisipan adalah suatu budaya politik dimana warga masyarakatnya sudah memiliki orientasi politik yang secara eksplisit di tujukan kepada sistem secara keseluruhan, bahkan terhadap struktur, proses politik, dan administratif. Dengan perkataan lain, perhatian dan intensitas terhadap masukan maupun keluaran dari sistem politik sangat tinggi. Dalam budaya politik partisipasi dirinya atau orang lain dianggap sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik, ia memiliki kesadaran terhadap hak dan tanggung jawabnya. Masyarakat juga merealisasikan dan mempergunakan hak-hak politiknya. Dengan demikian, masyarakat dalam budaya politik partisipan tidak begitu saja menerima keputusan politik (Almond dan Verba, 1984). Hal ini karena masyarakat telah sadar bahwa betapapun kecilnya mereka dalam sistem politik, mereka tetap memiliki arti bagi berlangsungnya sistem itu (Almond dan Verba, 1984).

Budaya politik partisipan hidup alam masyarakat yang orang-orangnya melibatkan diri dalam kegiatan politik atau paling tidak dalam kegiatan pemberian suara, dan memperoleh informasi yang cukup banyak tentang kehidupan politik. Budaya politik partisipan muncul jika orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif dikembangkan secara maksimal dan seimbang (Budi Winarno, 2008). Dengan budaya politik partisipan, maka kerja sistem politik demokrasi dapat dikembangkan karena pada budaya politik ini warga negara berperan sebagai individu yang aktif dalam masyarakat secara sukarela, karena adanya sikap saling percaya (*trust*) antar warga negara. Oleh karena itu, dalam konteks politik, tipe budaya ini merupakan kondisi ideal bagi masyarakat secara politik (Budi Winarno, 2008). Budaya politik partisipan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Dan juga merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung. Masyarakat cenderung di arahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak (Sumartono, 2018). Budaya politik partisipan atau partisipatif adalah suatu bentuk budaya yang berprinsip bahwa warga masyarakat di orientasikan untuk menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari keseluruhan sistem, struktur, administrasi dan proses politik pemerintahan. Orientasi warga terhadap objek politik tak hanya berupa input seperti ikut pemilu dan sebagainya, tetapi juga output, seperti menolak atau menerima kebijakan pemerintah, mengkritisi pemerintah dan sebagainya (Mustanir dan Jaya, 2016).

Budaya politik partisipan biasanya ada pada kondisi masyarakat di mana setiap individunya telah mampu melibatkan dirinya dalam aktivitas kehidupan politik, misalnya ikut memilih saat pemilu. Budaya politik ini memiliki ciri orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif yang terbilang baik dan

masyarakat telah mampu berperan secara aktif, sebagai akibat munculnya sikap saling percaya di antaranya warga negaranya, sehingga kehidupan demokrasi berkembang dengan baik (Ulzikri, Cahyadi dan Indrajat, 2021).

B. Budaya Melayu

Secara rasial etnik atau masyarakat, orang-orang Melayu mengakui berbagai agama yang dianut oleh orang rumpun Melayu. Namun dalam pengertian lebih sempit, orang-orang Melayu sejak abad ke-13 mengidentitaskan pula dirinya sebagai seorang muslim, seperti yang ada di kawasan Nusantara ini. Ini tidak bermakna bahwa orang Melayu tidak menghargai perbedaan akan adanya agama lain. Masuknya Islam sebagai bagian dari identitas Melayu ini, sesuai dengan ajaran Islam, masuklah Islam secara menyeluruh, termasuk dalam budaya. Dengan demikian, maka segala kebudayaan Melayu selalu merujuk kepada ajaran Islam (id.m.wikipedia). Istilah kebudayaan memang tak asing bagi kita khususnya yang berkecimpung di dunia ini, apakah itu sebagai agamawan, budayawan, seniman, penikmat budaya, pelaku budaya dan seni dan lainnya. Secara saintifik, kebudayaan dibahas secara luas dan mendalam dalam sains antropologi ataupun sosiologi. Seperti yang diuraikan di dalam antropologi, banyak para pakar kebudayaan mendefinisikan kata kebudayaan atau dalam adanan Inggrisnya culture. Sampai tahun 1950 paling tidak ada 179 definisi kebudayaan yang dikemukakan oleh para ahli. Namun kemudian, dari berbagai definisi itu didapati berbagai kesamaan, paling tidak kebudayaan memiliki dua dimensi yaitu isi dan wujud. Seperti yang di kemukakan oleh (Koentjaraningrat 1980). Yang mengutip pendapat Claude Kluckhohn, bahwa kebudayaan adalah sebagai seluruh ide, gagasan, dan tindakan manusia dalam angka memenuhi keperluan hidup sehari-hari, yang di peroleh melalui proses belajar mengajar. (learned action) Kemudian ditinjau secara umum, budaya terdiri dari dua dimensi, yaitu wujud dan isi. Dalam dimensi wujud, budaya terdiri dari tiga unsur, yaitu: (1) wujud dalam bentuk ide atau gagasan, (2) wujud dalam bentuk aktivitas atau kegiatan, dan (3) wujud dalam bentuk benda-benda atau artifak. Ditinjau dari dimensi isi, atau sering disebut tujuh unsur kebudayaan universal, maka kebudayaan terdiri dari tujuh unsur yaitu: (1) sistem religi, (2) bahasa, (3) teknologi dan peralatan hidup, (4) sistem mata pencaharian, (5) sistem organisasi sosial, (6) pendidikan, dan (7) kesenian. Unsur kebudayaan yang terakhir, yaitu kesenian sering juga di sinonimkan dengan istilah seni budaya.

Kajian budaya melayu ini bersinggungan dengan banyak hal (Efendy dalam Zainuddin, 2018). Menyebutkan bahwa manifestasi budaya melayu yang berkaitan dengan sistem sosial, interaksi dan komunikasi antar kelompok adalah nilai-nilai sopan santun, mengutamakan harkat dan martabat, serta memiliki tata pakaian melayu. Lain halnya dengan (Suwardi dalam Zainuddin, 2018). Sebagai budayawan dan sejarawan Riau mengemukakan bahwa manifestasi budaya melayu tidak hanya masalah nilai

dalam intraksi saja, melainkan juga persoalan nilai dalam arsitektur bangunan melayu. Ciri dari arsitektur bangunan melayu menurut Suwardi dapat dilihat dari bentuk atapnya yaitu lipat pandan, lipat kajang, dan layar. Kemudian di tandai juga dengan ukiranukiran pada dinding, atap, dan selembayung bermotif ulu keris atau merpati dua sejoli. Selain itu, dalam budaya melayu juga terdapat pengaturan seluruh kehidupan, baik yang sifatnya sakral maupun rutinitas biasa.

Menurut Hamdani dalam Putri (2018), nilai-nilai leluhur yang tergambar dari beragam karya sastra budaya Melayu meliputi: (a) nilai kegotong royongan, (b) nilai taat pada hukum, (c) nilai keterbukaan, (d) nilai adil dan benar, (e) nilai musyawarah dan mufakat, (f) nilai persatuan dan kesatuan, (g) nilai tenggang menenggang, (h) nilai hemat dan cermat, (i) nilai arif dan bijak, (j) nilai memanfaatkan waktu, (k) nilai amanah, (l) nilai bertanggung jawab, (m) nilai malu, (n) nilai berpandangan jauh ke depan, dan (o) nilai ilmu pengetahuan.

Kebudayaan melayu telah memainkan perannya yang sangat dominan bagi terbentuknya kebudayaan nusantara. Karena itu, jauh sebelum pergerakan kemerdekaan menentang penjajahan Hindia Belanda, bahasa melayu, kebudayaan melayu, serta adat istiadat Melayu sudah berkembang menjadi bagian utama dari ciri dan identitas budaya bangsa nusantara yang kemudian di beri nama Indonesia. Karena itu, sesudah bangsa kita menjadi Indonesia, meninggalkan wilayah jajahan Inggris yang tetap menggunakan kata Melayu sebagai nama identifikasinya, kita tidak perlu surut menjadi bangsa Melayu lagi, tetapi terus tumbuh dan berkembang sebagai bangsa Indonesia dengan bahasa nasional bahasa Indonesia, kebudayaan nasional kebudayaan Indonesia, dan dengan nama identifikasi sebagai Bangsa Indonesia. Dalam bingkai negara kesatuan Indonesia itu, identitas kemelayuan kita lebur menjadi satu sebagai bahan utama, tiang pokok, dan komponen material yang paling menentukan wajah budaya Indonesia itu sesungguhnya (Syamsuadi, 2018). Pengertian Melayu adalah Islam (Agama Islam). Apabila seseorang non- Islam melepaskan agamanya, kemudian masuk Islam di sebut menjadi Melayu. Ini beranjak dari teori bahwa adat dan agama telah menjadi satu kesatuan dalam budaya Melayu, sehingga semua aspek kehidupan itu menyatu. Budaya Melayu adalah Budaya Islam. Misalnya, konteks Indonesia, di Medan orang yang masuk Melayu itu di katakan masuk Islam. Orang Batak Karo, Simalungun, atau Cina yang masuk Islam dikatakan sebagai orang yang masuk Melayu. Secara kultur, mereka memang memelayukan diri dengan meninggalkan marga Batak, hidup dalam adat Resam Melayu dan dalam kehidupan sehari-hari memakai bahasa Melayu. Kondisi dan proses ini oleh antropologi Nagara, disebut sebagai proses Islam yang universal ke Islam yang partikularistik (Sanusi, 2017).

Masyarakat melayu pada umumnya identik dengan Islam yang menjadi pondasi dari sumber adat istiadatnya. Sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di wilayah nusantara sudah terdapat pemerintahan-pemerintahan otonom dengan berbagai bentuk. Bahkan, beberapa kerajaan besar pernah berdiri di wilayah nusantara sebelum

kemudian di kuasai oleh penjajah Belanda. Meskipun kerajaan-kerajaan besar di nusantara telah runtuh, bentuk-bentuk pemerintahan adat-tradisional di berbagai daerah masih terus bertahan, walaupun terus mengalami dinamika karena campur tangan pemerintah Hindia Belanda (Harun dan Sagala, 2013). Secara harfiah dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan adalah hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan negara (Surbakti, 2010). Karena itu apabila berbicara tentang sistem pemerintahan pada dasarnya adalah membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara menjalankan kekuasaan negara itu, dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat (Syamsudin, 2018).

Dalam sejarah Melayu, sistem pemerintahan memiliki dua konsep, yakni kerajaan dan negeri. Konsep kerajaan dalam sistem pemerintahan Melayu. Konsep kerajaan dalam sistem pemerintahan Melayu sudah ada sejak zaman Sriwijaya di Palembang. Dalam pelaksanaan konsep ini, kedudukan serta hak raja tidak dapat di permasalahan lagi apalagi diganggu gugat. Raja juga di perbolehkan berbuat apa saja. Konsep kerajaan juga tidak dibatasi oleh tempat dan wilayah. Maka pepatah melayu mengatakan “dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung” dimaknai bahwa dimana raja pergi maka disana lah kerajaannya, sehingga sebuah kerajaan bisa berdiri tanpa adanya negeri Selain konsep kerajaan maka budaya melayu juga dikenal mengenal sistem pemerintahan negeri. Penggunaan istilah “negeri” di Melayu sudah ada sejak kurun waktu \pm 500 Tahun yang lalu. Konsep negeri diartikan sebagai sebuah organisasi yang menjalankan undang-undang kepada seluruh rakyatnya. Negeri juga bisa diartikan sebagai tanah tempat tinggal suatu bangsa. Dalam konsep ini, negeri tidak hanya mencakup wilayah kekuasaannya saja, tetapi termasuk juga jajahannya atau negeri taklukannya, sehingga konsep negeri lebih luas dibanding konsep kerajaan (Syamsudin, 2018).

C. Ruang Lingkup Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana (Kartasasmita, 1994). Selain itu pembaganan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan di lakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah. Perencanaan pembangunan merupakan kegiatan hampir sama dengan riset / penelitian, dikarenakan instrumen yang digunakan adalah metode-metode riset. Kegiatannya berawal dari teknik pengumpulan data, analisis data sampai dengan studi lapangan untuk memperoleh data-data yang akurat. Data yang dilapangan sebagai data penting dan utama yang akan dipakai dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang di dasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan di gunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan / aktifitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental / spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik (Bratakusumah, 2004).

Proses perencanaan pembangunan dimulai dengan rencana pembangunan atau mungkin hanya dengan formulasi kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kemudian di ikuti dengan berbagai langkah-langkah kegiatan formulasi rencana dan implementasinya, dapat di usahakan rencana itu bersifat realistis dan dapat menanggapi masalah-masalah yang benar-benar dihadapi. Rencana dengan demikian merupakan alat bagi implementasi, dan implementasi berdasar pada suatu rencana. Hal tersebut seperti dikemukakan oleh untuk merealisasinya. Kemudian perencanaan sebagai proses yang meliputi (Tjokroamidjojo, 1994). sebagai berikut:

Proses perencanaan dapat di mulai dengan suatu rencana pembangunan atau mungkin hanya dengan formulasi kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kemudian diikuti langkah-langkah kegiatan (*mesure*) untuk merealisasinya. Walaupun di akui bahwa suatu rencana pembangunan memang suatu alat yang lebih baik untuk proses perencanaan dan pelaksanaannya. Dengan melihat perencanaan sebagai suatu proses yang meliputi formulasi rencana dan implementasinya, dapatlah di usahakan rencana itu bersifat realistis dan dapat menanggapi masalah-masalah yang benar-benar di hadapi. Rencana dengan demikian merupakan alat bagi implementasi, dan implementasi hendaknya berdasar suatu rencana (Tjokroamidjojo.1994).

D. Visi Dan Misi Palembang Emas Darussalam

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa kata elok sendiri merupakan istilah yang berasal dari bahasa Melayu Palembang yang artinya cantik atau indah. Dengan visi elok ini maka di harapkan Palembang akan menjadi sebuah Ibu Kota provinsi yang elok kotanya dan elok masyarakatnya. Visi kedua adalah madani, ketujuh narasumber sepakat bahwa madani adalah sebuah kota dengan masyarakatnya yang beradab, religius, menjunjung tinggi nilai dan moral serta adat istiadat yang dipercaya dan diyakini oleh masyarakat setempat (palembang.id).

Situasi dan kondisi kota dan masyarakat yang aman, nyaman dan tentram merupakan dambaan setiap orang. Bahkan menjadi visi yang tidak mungkin di lupakan oleh sebuah kota, begitupun juga Kota Palembang. Dengan visi ketiga ini, di harapkan kota ini menjadi tempat yang nyaman, aman, dan bersahabat bagi masyarakat asli maupun wisatawan yang berkunjung ke kota ini. Ketujuh narasumber sepakat bahwa ketika masyarakat sudah elok madani insyaallah kota ini menjadi kota yang aman (palembang.id).

Visi terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah sejahtera. Sejahtera dalam berbagai bidang kehidupan baik pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Ketika kota ini sudah elok, madani, aman maka visi terkahir yakni sejahtera akan tercapai (palembang2018). Program ini tentunya dibuat dan direncanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal yang pasti mempunyai dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap program ini. Beberapa program pemerintah bisa sukses

selain adanya dukungan dari masyarakat itu sendiri tetapi juga adanya dukungan dari sumber daya alam yang ada di kota tersebut (perpustakaan.upi.edu).

Misi Palembang Emas Darussalam 2023 :

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis Teknologi dan Informasi.
2. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan professional.
3. Mewujudkan Palembang Kota yang dinamis sebagai simpul Pembangunan Regional, Nasional dan Internasional yang Kompetitif dan Komparatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi.
4. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing tinggi.
5. Menjadikan Palembang Kota Pariwisata Sungai dan Budaya serta Event Olahraga kelas Dunia yang harmoni antara kehidupan manusia dan alam.